

KAJIAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI

Studi di Desa Mekarsari, Kec. Kumpeh dan Bukit Baling, Kec. Sakernan
Kabupaten Muaro Jambi-Propinsi Jambi

Muhammad Syafar, SE, M.Kesos
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Pendahuluan

Program kemakmuran hijau (*green prosperity program/GPP*), merupakan *icon* pembangunan baru (*new development*) yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan yang kaya sumberdaya alam (SDA). Berangkat dari kenyataan yang paradoks, dimana ketersediaan sumberdaya alam yang berlimpah di pedesaan tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakatnya. Isu energi terbarukan untuk pedesaan terpencil, penggunaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk pengembangan ekonomi lokal merupakan persoalan mendasar bangsa ini untuk mewujudkannya. Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia SDM di pedesaan menjadi salah satu faktor dalam mengelola SDA. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci sukses pembangunan sebuah negara. SDM adalah modal utama bagi negara agar dapat memenangkan kompetisi global yang identik dengan pasar bebas, sehingga menuntut semua negara menyiapkan SDM berkualitas, mampu bersaing dan berinovasi dalam menjawab kebutuhan zaman.

Rendahnya daya saing SDM merupakan ancaman dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini. Termasuk bagi Indonesia kondisi tersebut menjadi masalah serius, karena berdasarkan laporan *United Nations Development Program (UNDP)* menunjukkan jika tingkat kualitas SDM yang direpresentasikan dengan Human

Development Index (HDI), Indonesia pada tahun 2009, menempati peringkat ke-111 dari 192 negara. Peringkat ini menurun dibanding tahun 2008, yang menempati ranking ke-107 (UNDP, 2009). Peningkatan SDM menjadi tanggungjawab pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar harus mampu diarahkan pada peningkatan kapabilitas. Gegne dalam (Dimyati, Mudjiono, 2006) menjelaskan, belajar merupakan kegiatan yang kompleks yang diarahkan pada hasil berupa terciptanya kapabilitas.

Berdasarkan komitmen pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran, maka saat ini bekerja sama dengan UNDP dalam mensukseskan program Millennium Development Goals (MDG's) dengan salah satu targetnya "*Achieve universal primary education: ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling*", (UNDP, 2003). Dalam hal ini pendidikan menjadi agenda utama dalam mensukseskan pembangunan di suatu negara bahkan di dunia. Untuk itu, target MDG's ini diharapkan mampu mencapai tujuannya dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dengan berhasilnya program tersebut, diharapkan dapat berjalan seiring dengan tujuan GPP yang bermaksud membangun model baru dan abadi untuk mengembangkan, pertumbuhan hijau di tingkat lokal yang akan dikelola oleh masyarakat¹. Dengan harapan, GPP mampu melibatkan masyarakat lokal dalam mendorong sektor investasi dengan strategi pembangunan rendah karbon dan tumbuhnya kewirausahaan lokal melalui peluang yang muncul dalam energi terbarukan dan praktek penggunaan sumberdaya yang inovatif.

Atas dasar di atas, studi ini dilakukan di di Desa Mekarsari, Kec. Kumpoh dan Bukit Baling, Kec. Sakernan Kabupaten Muaro Jambi-Propinsi Jambi. Pemilihan lokasi ini berdasarkan 3 pertimbangan, yaitu: (1) kedua desa (Mekarsari dan Bukit

¹ www.mcc.gov/indonesia

Baling) merupakan desa yang berhimpitan langsung dengan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS). Di Mekarsari terdapat PT Ricky Kurniawan Kerta persada (RKK), sedangkan di Bukit Baling terdapat PT Bukit Bintang Sari (BBS) dan PT Kirana. Diduga kedua PKS tersebut sedang berproses untuk melaksanakan kegiatan terkait *methane capture*; dan (2) kedua desa merepresentasikan desa-desa yang memiliki kebutuhan energi listrik yang diperoleh dari energi tidak terbarukan.²

Dengan demikian, studi ini menyajikan beberapa hal, antara lain: (1) metodologi yang digunakan; (2) *landscape* dan struktur sosial-budaya masyarakat; (3) aktor dan jejaringnya; (4) pola pelepasan lahan; (5) relasi gender dalam aktivitas ekonomi warga; (6) manfaat energi listrik pada komunitas petani kelapa sawit; dan (7) dampak proyek *methane capture* energi terbarukan pada keluarga petani kelapa sawit.

Metode dan Pendekatan

Studi ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aparat desa, tokoh masyarakat, dan pedagang, serta melakukan diskusi informal dengan beberapa petani kelapa sawit. Adapun data kuantitatif sebagai pendukung diperoleh dari monografi desa.

Tabel 1. Metode dan Pendekatan *Gender and Social Assessment*.

Metode	Pendekatan	Substansi
Kualitatif	Identifikasi struktur sosiobudaya	Beragam etnik yang membentuk warga komunitas desa dan pola pewarisan
	Pemetaan sosial	Jaringan, kelembagaan, aktifitas nafkah utama, dan peta keterlibatan gender dari setiap tahapan produksi, budidaya, panen, dan pemasaran (distribusi)

² Untuk pertimbangan yang kedua ini, perlu disampaikan bahwa di Desa Bukit Baling sumber energi listrik berasal dari PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel).

Identifikasi peluang proyek listrik pada komunitas	Prediksi <i>methane capture</i> sebagai sumber pembangkit listrik terhadap pengembangan komunitas petani kelapa sawit
Identifikasi dampak pengembangan <i>methane capture</i> untuk listrik terhadap keluarga	Dampak terhadap: pendapatan, konsumsi, waktu kerja, ketersediaan fisik , dan partisipasi warga

Landscape dan Struktur Sosio-Budaya

Baik Desa Mekarsari-Kumpeh maupun Desa Bukit Baling-Sakernan merupakan desa yang berada di luar kawasan hutan taman nasional. Kemudian secara administratif, kedua desa tersebut memiliki sejarah yang berbeda. Mekarsari merupakan desa pemekaran dari Betung sebagai desa induknya, sedangkan Bukit Baling masih merupakan desa induk yang belum dimekarkan sama sekali. Sehingga hal wajar, apabila secara kependudukan, Mekarsari memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan Bukit Baling, yakni masing-masing sebanyak 682 Kepala Keluarga (KK) dan 1.926 Kepala Keluarga (KK). Meskipun demikian, nampaknya persentase jumlah petani di Mekarsari lebih banyak dibandingkan dengan Bukit Baling, yaitu 89,9% untuk Mekarsari dan 69,9% untuk Bukit Baling (Lampiran 1)

Selanjutnya dari aspek sosio-budaya, Mekarsari dan Bukit Baling memiliki kesamaan, yaitu perantau beretnik Jawa dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabt看) yang kemudian menetap dan melakukan kawin mawin dengan warga asli beretnis Melayu Jambi. Hal ini sebagaimana penuturan Kepala BPD Mekarsari:

“...sebagian besar warga desa Mekarsari pada awalnya merupakan transmigran lokal dari Kabupaten Tanjabtim yang menetap di Unit Pemukiman Transmigran (UPT) Kumpeh II pada tahun 1986. Pada waktu itu UPT Kumpeh II merupakan bagian dari Desa Betung, yang kemudian menjadi Desa Mekarsari. Sebagian besar transmigran lokal tersebut merupakan generasi kedua dari keturunan para transmigran beretnis Jawa dan Sunda yang menetap di Kabupaten Tanjabtim...”

Hal serupa dengan Bukit Baling. Selain warga asli beretnis Melayu Jambi, terdapat warga transmigran beretnis Jawa dan Sunda dari Kabupaten Tanjabtim.

Terkait dengan perkebunan kelapa sawit, diduga mulai masuk di Kecamatan Kumpeh (dimana desa Mekarsari termasuk didalamnya) pada awal tahun 1998 sebelum para PKS datang membuka usaha di daerah tersebut (Lihat **Gambar 1**). Hal ini sebagaimana pengakuan salah seorang warga Mekarsari:

“...pada tahun 1998, kelapa sawit mulai diperkenalkan oleh Bapak Tawari. Seorang perantau dari Jawa yang menjadi petani sawit di daerah Medan. Ia memperkenalkan ke wilayah kami serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sejak saat itu, kelapa sawit mulai digemari masyarakat secara individu yang ditanam di dataran tinggi dalam wilayah kami. Sementara itu, lahan di dataran rendah masih tetap ditanami oleh palawija dan padi (1 musim setiap tahun)...”

Kemudian, dua tahun setelah kelapa sawit diperkenalkan kepada warga di Mekarsari (tepatnya tahun 2000), perusahaan swasta memperoleh izin dari Bupati untuk membuka PKS dan melakukan sosialisasi ke desa-desa.³ Sehingga sejak tahun 2003, baik Mekarsari maupun Bukit Baling tanaman kelapa sawit mulai masif dan menjadi sasaran sawitisasi oleh perusahaan. Masuknya PKS tersebut, selanjutnya mempengaruhi pola usaha kelapa sawit yang diusahakan warga. Di Mekarsari, sebagian besar warga atau petani mengusahakan kelapa sawit dengan pola kemitraan dengan PKS. Sementara itu, warga atau petani di Bukit Baling mengusahakan kelapa sawit dengan pola kemitraan dan berhubungan langsung dengan pedagang yang memiliki DO (*delivery order*) dari PKS.

³ Adapun mekanisme yang harus dilalui perusahaan untuk mengembangkan kelapa sawit, sebagai berikut: izin Bupati, sosialisasi, pembersihan, pembibitan, ukl, izin usaha perkebunan, penanaman, HGU (tanah ulayat) setelah menghasilkan beberapa tahun ke depan.



Gambar 1. Petani Kelapa Sawit di Desa Mekarsari

Jika kita ditelusuri lebih jauh, kehendak warga pendatang di kedua desa tersebut awalnya tidaklah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Hal ini sebagaimana nampak dari salah seorang warga transmigran di Mekarsari yang memaparkan alasan merantau ke UPT Kumpeh II:

“...saya mencari tanah yang lebih tinggi untuk ditanam tanaman tahunan sebagai bekal di hari tua, tadinya kami menanam tanaman palawija (ubi, jagung), dan di lahan pematang di tanam 10-50 batang kelapa sawit, buah duku dan durian. Setiap transmigran mendapat pembagian dari pemerintah tanah kebun seluas 2 ha dan tanah pekarangan 0,25 ha...”

Ungkapan di atas begitu jelas bahwa pada awalnya keberadaan transmigran lebih pada mengembangkan tanaman padi dan palawija dibandingkan kelapa sawit. Kehadiran para pendatang (Jawa dan Sunda) disambut baik oleh penduduk lokal. Mereka saling belajar satu sama lain. Para pendatang belajar menanam tanaman tahunan, seperti: duku dan durian dari penduduk lokal. Sebaliknya warga lokal belajar berbudidaya padi dan palawija dengan lebih baik.

Namun seiring dengan perjalanan waktu dan penetrasi PKS di kedua desa tersebut, penduduk lokal maupun pendatang yang memiliki lahan kebun di dataran tinggi mulai mengganti dengan tanaman sawit yang ditanam secara tumpangsari dengan duku dan durian. Sementara itu, di dataran rendah warga tetap mengusahakan padi ladang dan palawija. Walau demikian, keterbatasan lahan pasang surut menyebabkan warga di kedua desa hanya bisa menanam padi setahun sekali. Hal ini sebagaimana dikemukakan Kepala BPD Mekarsari:

“...di Mekarsari, mulai RT 01-06 yang berlokasi di dataran rendah dan selalu tenggelam jika banjir terjadi. Sehingga warga hanya bisa menanam padi dan palawija setahun sekali. Pada saat air pasang (sekitar bulan Desember-April) karena banjir sungai batang hari, maka tanaman padi dan palawija tenggelam tidak bisa menghasilkan. Kondisi seperti ini, menyebabkan petani hanya memanfaatkan alam dengan mencari ikan (memasang tembilar/bubu). Sementara itu, golongan muda (laki-laki maupun perempuan) dan ibu-ibu mencari kerja di PKS. Sedangkan petani di RT 06-17 yang berlokasi di dataran relatif lebih tinggi, lahan kebunnya sudah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit”.

Atas tekanan alam Mekarsari di atas, warga pendatang maupun lokal kemudian mengalihkan tumpuannya dari tanaman tahunan, padi, dan palawija ke kelapa sawit. Adapun peralihan tumpuan ke kebun kelapa sawit tersebut, didasarkan pada keinginan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Demikian halnya terjadi di Bukit Baling. Warga pendatang yang melakukan transmigrasi spontan di desa ini berpandangan bahwa kedatangannya di Bukit Baling untuk memperbaiki nasib. Awalnya mereka berkebun karet untuk menambah pendapatan keluarga. Namun seiring perjalanan waktu, kebun karet dianggap tidak berpotensi dibandingkan kelapa sawit. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang warga:

“...saya datang dari Jawa 10 tahun lalu ke desa ini dengan harapan punya kehidupan yang lebih baik dari pada di kampung halaman. Selama 2 tahun saya menjadi pekerja di kebun orang untuk bisa menabung dan bisa membeli tanah. Hasilnya pada tahun 2004, saya bisa membeli kebun. Saya dulu membelinya Rp. 35 juta/ha dan memiliki 2 ha kebun yang dulu masih berupa kebun karet. Saat ini, kebun itu saya ganti dengan pohon sawit yang sudah berusia 7 tahun...”

Hingga saat ini, kurang lebih 75% warga Bukit Baling berasal dari etnik Jawa dan sudah berasimilasi dengan budaya lokal setempat. Sementara sisanya adalah warga beretnik Melayu Jambi (lokal).⁴

Selanjutnya di lokasi studi memperlihatkan adanya keterkaitan antara tipologi penduduk berdasarkan etnik dengan sistem pewarisan lahan (sumberdaya) yang menentukan sumber nafkah di kedua desa. Baik Mekarsari maupun Bukit Baling, sebagian warganya adalah transmigran keturunan Jawa dan Sunda, yang sudah berasimilasi dengan warga asli etnik Melayu Jambi. Sehingga terdapat 3 tipologi masyarakat di kedua desa tersebut, yaitu: pertama, tipologi warga lokal (etnik Melayu Jambi). Untuk tipologi ini, sistem pewarisan berdasarkan sistem *matrilineal* yang sedikit banyak dipengaruhi dari etnik Minang. Disini, aktivitas pembukaan hutan adat yang kemudian menjadi sumberdaya kebun diwariskan pada laki-laki. Sementara itu, untuk sumberdaya ladang (huma) diwariskan pada perempuan. Demikian halnya untuk rumah dan halamannya, sepenuhnya diwariskan untuk perempuan.

⁴ Warga pendatang etnik Jawa masuk ke desa sekitar tahun 1985 sebagai transmigran spontan yang tujuannya ingin memperoleh penghidupan yang lebih baik, yaitu bekerja sebagai petani karet. Pertama kali mereka datang sebagai buruh di kebun warga yang sudah memiliki kebun karet, kemudian jika sudah memiliki cukup tabungan, mereka akan membeli kebun sebagai asetnya ke depan di desa tersebut. Namun sekarang kebun karet sudah mulai ditinggalkan oleh warga dan diganti dengan kebun kelapa sawit yang menurut warga mampu memberikan hasil yang lebih baik daripada karet.

Tabel 2. Tipologi Etnisitas dan Sistem Pewarisan Lahan di Mekarsari-Kumpeh dan Bukit Baling-Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Tipologi Etnisitas	Sistem Pewarisan	Sumberdaya Lahan		
		Kebun	Ladang (<i>Huma</i>)	Rumah dan Halamannya
<i>Melayu Jambi</i> (lokal)	<i>Matrilineal</i> (dipengaruhi sistem pewarisan minang)	Laki-laki	Perempuan	Perempuan
<i>Jawa</i> (pendatang)	<i>Bilineal</i>	Laki-laki dan perempuan	Laki-laki dan perempuan	Laki-laki dan perempuan
<i>Campuran</i> (perempuan lokal nikah dengan Laki-laki Jawa, dan-sebaliknya)	Cenderung mengikuti perempuan (<i>matrilineal</i>)	Laki-laki	Perempuan	Perempuan

Sumber: Peneliti, (Diolah).

Kedua, tipologi warga pendatang (etnik Jawa). Untuk tipologi ini, sistem pewarisan berdasarkan sistem *bilineal*, dimana lahan kebun dapat diwariskan kepada laki-laki maupun perempuan. Hal yang sama untuk sumberdaya ladang (*huma*) maupun rumah dan halamannya, dimana laki-laki maupun perempuan berhak atas sistem pewarisan yang berlaku; dan *ketiga*, tipologi warga campuran (perempuan dari etnik lokal nikah dengan laki-laki dari etnik Jawa atau sebaliknya). Untuk tipologi ini lebih “berkiblat” pada tipologi 1 (lihat **Tabel 2**).

Sebagai warga transmigran (Jawa, Sunda) dari program pemerintah, maka pemilikan lahan kebun, ladang (*huma*) dan pekarangan sebagian besar petani di desa Mekarsari dimiliki oleh laki-laki, namun pewarisannya bisa mengikuti jalur *bilineal* (Jawa, Sunda) maupun jalur matrilineal (dalam perkawinan campuran dengan etnik lokal Melayu Jambi). Sementara untuk petani di Bukit Baling yang melakukan transmigran spontan (Jawa, Sunda) dan kemudian membeli lahan kebun, maka pemilikannya juga oleh laki-laki, serta pewarisannya sama dengan pola di Mekarsari, bisa mengikuti jalur bilineal maupun *matrilineal*. Hal ini menunjukkan bahwa lahan kebun sebagai tempat aktivitas nafkah utama petani dimiliki (dikuasai) oleh laki-laki, dan ladang (*huma*) untuk ketahanan pangan dimiliki (dikuasai) oleh perempuan.

Aktor dan Jaringannya

Kondisi *landscape* dan ekonomi kedua desa yang menjadi lokus studi ini, sangat menentukan siapa aktor yang berpengaruh dan jejaring yang dibangunnya. Dengan demikian, aktor di kedua desa dapat dibagi ke dalam dua, yaitu aktor lokal dan aktor PKS. Kehadiran dua aktor tersebut, sangat penting untuk memposisikan jalinan relasi yang kuat antara masyarakat dengan perusahaan.

Di Mekarsari, aktor lokal yang punya pengaruh kuat di level warga adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat. Para aktor lokal ini, memiliki pengaruh yang kuat dalam menjalin relasi dengan PKS. Keaktoran mereka ditengha-tengah warga disebabkan mereka memiliki kapasitas ketokohan yang mumpuni dilihat dari kepemilikan modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik yang kuat dan berpengaruh dalam kehidupan di masyarakat. Sehingga tidak jarang, keberadaan posisi keaktrotan mereka saat ini adalah andil dari aktor PKS. Sedangkan aktor PKS, umumnya adalah manager perusahaan yang bertanggungjawab atas keamanan dan keberlanjutan produksi kelapa sawit perusahaan.

Seperti halnya dengan Mekarsari, ketokohan aktor di Bukit Baling menjadi kunci bagi PKS mampu diterima oleh masyarakat. Peranan aktor sebagai pendorong ekonomi warga sekaligus menguatkan posisinya dalam mengatur ekonomi desa. Selain ke empat aktor (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Adat), terdapat pula tokoh pedagang kelapa sawit (*toke*) sebagai aktor yang memiliki modal ekonomi, sehingga dapat mempengaruhi warga. Setidaknya kasus pemilihan kepala desa (pilkades) tahun 2013 di Bukit Baling dapat menjadi penjelas fenomena bekerjanya jaringan aktor antara aktor ekonomi dengan aktor lokal. Pada saat pilkades di Bukit Beliang, terdapat 3 kandidat kades, yaitu: (1) Bapak A (penduduk lokal beretnik Melayu Jambi, adalah calon yang didukung mantan kades yang berhenti karena mencalonkan diri menjadi anggota DPRD dari

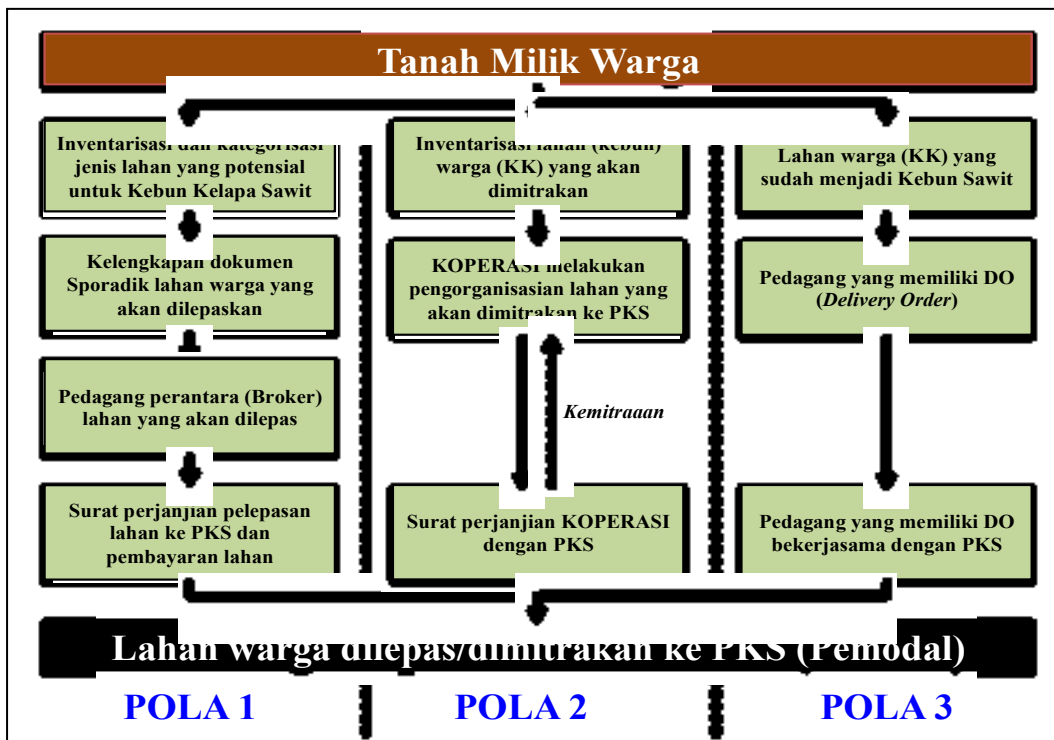
salah satu partai); (2) Bapak B (penduduk pendatang beretnik Jawa, tokoh muda, *toke*/pedagang sawit); dan (3) Bapak C (penduduk pendatang beretnik Jawa, *toke*/pedagang kelapa sawit, didukung *toke* besar). Dalam rivalitas ketiga kandidat kades tersebut, modus operandi persaingan dapat dilihat dari program andalan dari salah satu calon yang didukung *toke* besar, yaitu memperjuangkan lahan desa yang dulu dibagikan kepada warga yang diambil oleh perusahaan kelapa sawit untuk dikelola.

Pola Pelepasan Lahan dan Kemitraan

Pola pelepasan lahan di kedua lokasi studi nampak bahwa lahan-lahan warga yang akan dilepas/dimitrakan ke PKS atau pemodal merupakan tanah warga yang sudah memiliki sporadik yang ditandatangani Kepala Desa. Determinasi lahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi warga menyebabkan lahan menjadi penting dalam kajian ini. Setidaknya terdapat 3 pola pelepasan lahan (**Gambar 1**), yaitu: *pertama, pola 1*, yaitu sebelum lahan milik warga yang sudah memiliki sporadik dilepaskan ke PKS/pemodal, dilakukan inventarisasi dan kategorisasi jenis lahan (lahan kosong dan lahan produktif). Umumnya, untuk lahan kosong dinilai seharga Rp. 40.000/ha dan lahan produktif dinilai berkisar Rp. 60.000-Rp. 100.000/ha. Disini pedagang perantara lahan (*broker*) memainkan peran penting untuk menghubungkan antara warga dengan pihak PKS/pemodal.

Kedua, pola 2, yaitu pelepasan lahan kepada perusahaan yang diorganisir oleh koperasi. Disini koperasi mengorganisir warga yang memiliki itikad untuk melepaskan lahannya melalui pola kemitraan dengan perusahaan. Lahan-lahan warga yang sudah memiliki sporadik diorganisir koperasi untuk dibuatkan surat perjanjian dan pembayaran lahan yang akan dilepaskan. Setelah surat perjanjian ditandatangani oleh dua belah pihak (antara koperasi dan perusahaan), koperasi kemudian mendistribusikan biaya pelepasan lahan kepada masing-masing keluarga

yang terlibat dalam pola ini; dan *ketiga, pola 3*, yang lebih bermotif melepaskan hasil kebun sawit kepada pedagang (toke) yang memiliki delivery order (DO) dengan PKS. Disini pedagang (toke) memiliki pengaruh kuat karena memiliki relasi dengan pihak PKS.



Gambar 2. Pola Pelepasan Lahan di Lokasi Studi.

Terkait dengan *pola 3*, warga sebagai produsen tidak dapat dipisahkan dengan pembeli, utamanya perusahaan kelapa sawit maupun pedagang sebagai pemegang *delivery order* (DO) dari PKS. Di desa Bukit Baling, pedagang (toke) kelapa sawit memegang peranan penting sebagai penghubung antara petani dengan PKS. Seperti diungkapkan seorang petani berikut:

“...petani sawit mendapat informasi harga tandan buah segar dari pedagang, sementara pedagang sebagai pemilik DO mendapat informasi dari pabrik (PKS). Pedagang dapat memiliki DO antara 8-10 ton. Pedagang membeli tandan buah segar (TBS) dari petani seharga Rp 11.000,- per kg dan menjual ke PKS seharga Rp 14.000,- per kg. Petani juga bisa meminjam modal kepada pedagang tersebut...”

Pola kemitraan antara warga sebagai petani dengan baik di Mekarsari maupun Bukit Baling relatif sama. Awalnya perusahaan membantu kebun tanaman karet petani untuk ditebangi dan kemudian diusahakan menjadi kebun kelapa sawit. Dengan demikian lahan kebun dimiliki oleh petani namun dikelola sepenuhnya oleh PKS, dimana uang penjualan hasil panennya nanti dipotong untuk biaya membeli bibit dan pemupukan.

Untuk ***pola 2***, kemitraan antara warga dengan PKS dilakukan sejak PKS masuk di dua desa tersebut. Di Mekarsari, PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) melakukan MoU Kemitraan dengan warga yang menghasilkan kesepakatan bagi hasil 70:30 melalui Koperasi Bina Usaha. Sementara itu, di Bukit Baling warga mulai melakukan kemitraan dengan PT BBS dengan pola yang sama melalui Koperasi Aksobandono. (Gambar 3).

Bentuk program kemitraan plasma di Koperasi Bina Usaha, menurut sekretaris desa Mekarsari adalah sebagai berikut:

“...(1) tanah masyarakat dikelola menjadi kebun kelapa sawit oleh perusahaan, dimana setiap 1 Ha yang diusahakan maka 0,5 Ha adalah untuk perusahaan dan 0,5 Ha untuk masyarakat; (2) dari luasan kebun kelapa sawit hak masyarakat tersebut maka setiap KK mendapatkan kebun seluas 0,686 Ha melalui pemilikan surat sporadik; (3) setelah kebun dirawat oleh perusahaan, maka koperasi menjadi lembaga untuk bagi hasil antara perusahaan dengan kelapa sawit, yaitu hasil panen buah kelapa sawit dikurangi biaya perawatan dan membayar pinjaman ke bank, maka keuntungannya dibagi antara perusahaan dan petani dengan perbandingan 70 untuk perusahaan dan 30 untuk petani...”

Fakta ini menunjukkan bahwa dalam pola kemitraan tersebut petani memiliki lahan kebun kelapa sawit, sementara perusahaan memiliki modal (melalui pinjaman ke bank) dan menjalankan seluruh pengelolaan usaha kebun tanpa melibatkan petani. Keadaan ini cenderung menjadikan petani tidak berkembang kapasitasnya sebagai petani kelapa sawit karena tidak ada proses pembelajaran berbudi daya sawit, dan semakin memposisikan petani sebagai pelaku usaha yang lemah dan tidak memiliki pengetahuan budidaya sawit⁵.



Gambar 3. Suasana Pabrik Kelapa Sawit PT. BBS (Kiri) dan PT. RKK (Kanan)

Meskipun demikian, dengan pola kemitraan tersebut, menurut seorang tokoh warga dianggap telah dapat meningkatkan ekonomi warga dibandingkan sebelum ada kebun PKS, seperti pernyataan berikut:

⁵ bahkan menurut seorang pengurus APKSINDO cab Jambi, lebih bagus pola PIR yang dulu; dengan pola kemitraan sekarang dimana petani langsung berhadapan dengan perusahaan tanpa melibatkan pemerintah, maka petani cenderung kalah. Misalnya pengalihan hutang ke bank dilakukan sepihak oleh perusahaan tanpa melibatkan pemerintah, dan beban hutang ikut ditanggung oleh petani.

“...saat ini setiap bulan warga memperoleh bagi hasil⁶ paling sedikit Rp. 100.000 sedangkan terbesar Rp. 470.000, selama yang saya tahu biasanya terjadi pada panen sawit besar-besaran...”

Proses belajar berkebun sawit justru didapatkan oleh petani yang ia dan atau anggota keluarganya pada awalnya mau bekerja menjadi buruh perusahaan kelapa sawit. Setelah cukup tabungan yang diperoleh dari berburuh maka ia akan berusaha membeli dan mengelola sendiri kebun sawitnya (**Gambar 4**). Seperti diungkapkan seorang petani di desa Bukit Baling sebagai berikut:

“...lebih enak mengurus usaha kebun sawit sendiri daripada diserahkan perusahaan kelapa sawit (PKS). Dengan menyerahkan pada PKS maka petani menjadi tidak tahu menahu masalah perawatan dan hanya menerima uang bagi hasil setiap bulan. Dari hasil berburuh di PKS, saya punya kebun kelapa sawit seluas 2 Ha usia 7 tahun, setiap dua minggu menghasilkan 2,5 ton. Harga buah sawit saat ini di petani Rp 11.000,- per kg. Setiap bulan saya dapat menerima hasil bersih Rp 1.000.000 per bulan per Ha...”



Gambar 4. Suasana Kebun Kelapa Sawit PT. RKK desa Mekarsari

⁶ Koperasi memiliki peran ikut mengontrol pengelolaan usaha kebun yang dilakukan perusahaan dengan mempekerjakan tenaga lapang mandor, pengawas pemupukan dan panen (dua orang per hari) yang digaji koperasi, agar hasil produksi kelapa sawit terjaga baik. Koperasi menjadi simbol wakil petani.

Keberadaan PKS di kedua desa tersebut ternyata mampu menggerakkan ekonomi warga, selain hasil usaha kebun kelapa sawit maka PKS juga memberikan kesempatan kerja kepada warga. Ada anggapan warga mulai merasakan adanya perbaikan ekonomi rumah tangga sejak adanya sawit. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang mandor PT. RKK dan seorang tokoh desa berikut ini :

“...Kami sangat beruntung dengan adanya PT Sawit, banyak juga warga desa kami yang terserap sebagai tenaga kerja di PT Sawit, dimana dari 1000 karyawan, 300 orangnya (30 persen) adalah warga kami karyawannya dan itu berpengaruh pada ekonomi rumah tangga...” “...Warga di desa Mekarsari (laki-laki dan perempuan) ada yang menjadi tenaga kerja di perusahaan, baik sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) maupun Buruh Harian Tetap (BHT). Pekerjaan yang dilakukan mulai menjadi buruh pemetik buah kelapa sawit (“pendodos”), pemupukan, pembuat piringan, sampai menjadi mandor dan supervisor. Semua tenaga kerja memperoleh bayaran bulanan, namun yang memperoleh asuransi hanya BHT saja. Fasilitas perumahan disediakan bagi supervisor, mandor dan BHT. Sekitar 60 persen pekerja adalah BHL atau buruh borongan (seimbang antara buruh laki-laki dan buruh perempuan) dengan bayaran sebesar Rp. 57.000 per hari yang juga dibayarkan setiap bulan dan mendapatkan libur kerja di hari minggu...”

Perbaikan standar kehidupan juga di rasakan oleh pemerintah desa, melalui program bina desa, perusahaan mampu bekerja sama dengan desa melakukan pembangunan baik secara fisik maupun peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) di desa. Selain itu, keberadaan koperasi juga memberikan insentif bagi desa atas pelaksanaan program kemitraan antara warga dengan perusahaan, yaitu berupa bagi hasil yang digunakan untuk pembangunan di desa, seperti yang dikemukakan oleh tokoh desa Mekarsari berikut ini :

“...Dengan adanya Koperasi, bisa mensejahterakan desa kami juga setiap bulannya, dari 100 persen bagian warga yang diperoleh dari bagi hasil, maka 10 persen untuk koperasi. Selanjutnya dari 100 persen bagian koperasi, maka 10 persennya dialokasikan untuk: 2,5 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD), insentif pengurus 2,5%, dan kas koperasi 5 persen...”

Berdasarkan pengalokasian tersebut, menurut tokoh desa Mekarsari, kemudian ada kecenderungan koperasi yang semula dibentuk oleh pemerintah desa, lebih berpihak pada perusahaan dan lebih memiliki kuasa daripada desa. Seperti diungkapkan tokoh desa berikut:

“...pada awalnya koperasi yang membentuk adalah pemerintah desa, dimana kemudian pemerintah desa berfungsi sebagai Badan Pengawas (BP) Koperasi. Setiap ada pertemuan koperasi dengan perusahaan maka BP Koperasi tidak pernah dilibatkan. Namun ketika ada gejolak di masyarakat, baru koperasi minta bantuan pemerintah desa. Hal ini karena koperasi merasa telah memberika PAD pada pemerintah desa. Oleh karena itulah ada usulan untuk kedepan, kelembagaan ekonomi dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hal ini didukung fakta bahwa banyak petani mengikuti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI dan berjalan lancar...”

Peranan gender dalam komunitas petani sawit

Aktivitas nafkah utama petani di desa Mekarsari dan Bukit Baling adalah berkebun kelapa sawit, dimana dalam kebun tersebut juga ditanami buah duku dan durian sebagai tanaman tumpangsari. Untuk desa Mekarsari, sebagian wilayahnya terletak di dataran lebih rendah, sehingga bila musim hujan tiba dan sungai batanghari pasang, maka ladang (huma) untuk bertanam padi menjadi tenggelam dan beralih fungsi menjadi tempat menangkap ikan seperti ikan gabus dan sepat. Selanjutnya pada musim kering (kemarau) maka ladang (huma) kembali ditanami dengan palawija (ubi dan jagung) sebelum ditanam padi di bulan september setahun sekali. (lihat Tabel 3.)

Tabel 3. Kelender Aktivitas Ekonomi Warga Mekarsari dan Bukit Baling

Musim	Aktivitas Ekonomi	Bulan ke-	Distribusi Kerja
<i>Basah</i>	Kelapa Sawit, Duku, Durian di kebun	Oktober s.d Maret	▪ Laki-laki menanam, memupuk dan menyemprot, panen di kebun ▪ Perempuan membersihkan rumput, membuat piringan, penjemuran

	Padi di ladang (huma)	Jan-Febr	▪ Panen padi oleh perempuan
	Mencari ikan, mengasinkan ikan, menjual ikan, dan menjadi buruh	Februari s.d Juni	▪ Mencari ikan oleh laki-laki; ▪ Mengasinkan ikan oleh perempuan; ▪ Menjual ikan oleh perempuan ▪ Menjadi buruh kelapa sawit (laki-laki dan perempuan);
<i>Kering</i>	Kelapa Sawit, Duku, Durian di kebun	April s.d Okt	▪ Laki-laki menanam, memupuk dan menyemprot, panen di kebun ▪ Perempuan membersihkan rumput, membuat piringan, penjemuran
	Menanam palawija	Mei s.d Sept	▪ Menanam tanaman palawija oleh perempuan di ladang
	Persiapan tanam padi	Sept s.d Okt	▪ Dilakukan oleh laki-laki di ladang

Sumber: Peneliti (Diolah).

Hasil asimilasi antara etnik Jawa atau Sunda dengan etnik Melayu Jambi yang kebanyakan melakukan pernikahan secara adat Jambi, memunculkan pembagian kerja dan tanggung jawab di kebun dan ladang (huma) antara laki-laki dan perempuan yang cenderung bersama. Sementara bekerja di hutan masih dianggap sebagai pekerjaan laki-laki karena letak yang relatif jauh dari desa, dan perempuan dianggap (stereotype) secara fisik relatif lebih lemah daripada laki-laki sehingga tidak sanggup untuk masuk hutan. Selanjutnya kerja di padi ladang (huma) adalah dominan kerja perempuan, meski ada laki-laki yang membantu untuk penyiapan lahan, pemupukan dan penyemprotan.

Untuk kebun sawit, bekerja di kebun, maupun menjadi buruh kebun sawit bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan (baik oleh etnik Melayu Jambi maupun etnik Jawa/Sunda) sebagai diperlihatkan pada **Gambar 5**. Data pada tabel 4. berdasarkan aktivitas kerja sebagai buruh kebun di PKS menunjukkan bahwa kerja perempuan adalah bagian pembuatan bibit, pembuatan piringan, dan

pembersihan rumput, sementara laki-laki bagian pengolahan lahan, pemupukan, pengangkutan dan penjualan hasil. Perempuan juga terlibat dalam pemanenan, khususnya untuk mengambil butiran buah segar yang jatuh kebawah, namun pekerjaan memanen buah kelapa sawit lebih banyak didominasi oleh laki-laki.



Gambar 5. Aktivitas Petani Perempuan Kelapa Sawit di desa Bukit Baling

Tabel 4. Pembagian Kerja dan Tanggungjawab Antara Laki-laki dan Perempuan di Kebun Kelapa Sawit, Reproduksi dan Sosial di Desa Mekarsari dan Bukit Baling

Aktivitas	Pembagian Kerja		
	Laki-laki	Perempuan	Bersama
Pengolahan Lahan	L		
Pembibitan		P	
Penanaman			L&P
Pembuatan Piringan		P	
Pemupukan	L		
Pemotongan daun tua			L&P
Pembersihan rumput		P	
Pemanenan			L&P
Pengangkutan	L		
Penjualan	L		
Kegiatan Reproduksi		P	
Kegiatan Sosial			L&P

Sumber: Data Lapangan. Ket.: L = Laki-laki; P = Perempuan.

Untuk kegiatan reproduktif (mengurus rumah tangga), baik pada etnik Melayu Jambi maupun etnik Jawa atau Sunda, tetap merupakan pekerjaan dan tanggungjawab perempuan. Pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak dilakukan oleh perempuan, sementara kegiatan membersihkan rumah kadang-kadang dibantu oleh suami. Dalam hal pengelolaan keuangan, baik untuk urusan rumah tangga maupun urusan kebun dan ladang masih dominan dilakukan oleh perempuan. Untuk kegiatan sosial, perempuan hanya terlibat dalam pengajian maupun kegiatan hajatan yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (kelahiran, menikah, dan kematian), sementara untuk kegiatan publik yang terkait dengan program pembangunan, seperti pertemuan desa maupun pertemuan kelompok tani, masih didominasi oleh laki-laki.

Asset atau sumberdaya yang menentukan terutama dalam pembangunan usaha kebun kelapa sawit, antara lain: lahan, tenaga kerja, pembelian bibit, pelatihan dan penyuluhan, kelompok tani, koperasi, organisasi sosial, organisasi kekerabatan, pendapatan dan kredit. Akses terhadap lahan hutan lebih dimiliki oleh laki-laki, akses terhadap ladang (huma) lebih dimiliki oleh perempuan, sementara akses terhadap kebun dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Untuk tenaga kerja di kebun maupun di ladang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama, melalui jaringan kerjasama sesama pekebun, buruh kelapa sawit, petani, buruh tani yang dimiliki masing-masing. Pada masa lalu, kerjasama dalam usaha ladang tersebut dinamakan “pelarian” (tolong menolong) yang melibatkan kaum perempuan.

Terkait pembelian bibit sawit, menurut seorang petani sawit yang mengelola sendiri kebunnya menyatakan urusan beli bibit kebanyakan urusan laki-laki, seperti disampaikan berikut:

“...harga bibit sawit yang bagus cukup mahal Rp 30.000,- per batang, butuh modal cukup besar sekitar Rp 15 juta untuk 500 an batang. Bibit dibeli di Jambi. Saya yang memilih dan membeli sendiri bibitnya...”

Selanjutnya dalam hal akses terhadap sumberdaya pembangunan, nampak bahwa terkait peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pelatihan, penyuluhan) masih didominasi oleh laki-laki. Menurut tokoh desa di Mekarsari, pelatihan berkebun sawit bagi petani (laki-laki dan perempuan) relatif belum ada. Pelatihan yang sudah ada adalah untuk pengurus koperasi (laki-laki).

Fakta juga menunjukkan bahwa perempuan turut berperan aktif dalam kegiatan berusaha kebun kelapa sawit namun jarang perempuan turut menjadi anggota kelompok tani. Kecuali untuk petani kelapa sawit perempuan yang berstatus janda, maka perempuanlah yang terdaftar menjadi anggota kelompok tani dan koperasi. Disisi lain, adat melayu juga cenderung masih ada larangan untuk perempuan banyak terlibat dalam kegiatan publik. Oleh karena itu, kegiatan berorganisasi ekonomi (kelompok tani, koperasi) masih didominasi aksesnya oleh laki-laki, sementara perempuan cenderung masih lebih akses dalam organisasi sosial yasinan dan organisasi kekerabatan, seperti hajatan.

Selanjutnya kontrol terhadap asset sumberdaya pembangunan khususnya asset lahan kebun kelapa sawit, maka baik pada etnik Jawa dan Sunda maupun etnik Melayu Jambi, keputusan untuk membeli dan menjual kebun serta nama yang tertera dalam surat sporadik adalah laki-laki. Dalam hal kegiatan usaha kebun sawit, pengadaan bibit dan pupuk maupun kegiatan berorganisasi kelompok tani dan koperasi, keputusan juga dominan dilakukan laki-laki. Hal ini karena sebagian besar anggota yang terdaftar adalah laki-laki. Sebagai implikasinya, dalam hal kegiatan penyuluhan dan pelatihan, maka keputusan terkait siapa yang terlibat atau hadir dalam penyuluhan dan pelatihan cenderung didominasi laki-laki. Hal

ini juga menunjukkan bahwa kebun kelapa sawit cenderung merupakan domain laki-laki, meski partisipasi kerja perempuan nyata didalamnya.

Bagi petani yang mengelola kebun sawitnya sendiri maka keputusan untuk menjual hasil kelapa sawitnya ke pedagang juga dominan diputuskan oleh laki-laki. Sementara untuk organisasi sosial dan kekerabatan, dan penggunaan pendapatan maka keputusan dilakukan bersama antara laki-laki dan perempuan. Untuk kegiatan reproduktif (mengelola rumah tangga), maka keputusan cenderung dilakukan oleh perempuan, kecuali untuk hal-hal besar seperti membeli sepeda motor, menyekolahkan anak maka dilakukan keputusan bersama antara laki-laki dan perempuan.

Manfaat Energi listrik pada komunitas petani kelapa sawit

Sampai saat ini petani kelapa sawit yang mengelola sendiri usaha kebunnya memperoleh pendapatan dari hasil penjualan panen buah kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar (TBS). TBS tersebut dijual ke pedagang (toke) untuk harga sekarang Rp 11.000,- per kg dan pedagang yang memiliki DO menjualnya ke PKS seharga Rp 14.000,- per kg. Sementara untuk petani kelapa sawit dengan pola kemitraan bahkan sama sekali tidak pernah melihat hasil panen buah dalam bentuk TBS karena setiap bulan langsung menerima hasil dalam bentuk uang bagi hasil dengan perusahaan.

Sebenarnya masih banyak nilai tambah yang bisa diperoleh dari hasil produksi kelapa sawit selain berupa TBS, melalui pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS)⁷ yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kelapa sawit mulai dari buah, pelepah, batang, dan limbahnya, dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Pada proses pengolahan TBS akan dihasilkan

⁷ Dikutip dari Erliza Hambali, 2010. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB.

CPO, kernel, tandan kosong, *mesocarp fiber* (MF), cangkang, dan *Palm Oil Mills Effluent* (POME).

Sampai saat ini proses pengolahan TBS tersebut baru dilakukan oleh beberapa PKS atau karena keterbatasan pengetahuan PKS maka limbah TBS dijual saja ke pelaku lain di Indonesia maupun di ekspor. Hasil keuntungan dari proses pengolahan TBS maupun penjualan limbahnya masih hanya dinikmati oleh PKS (Perkebunan Kelapa Sawit) itu sendiri. Hal ini seperti diungkapkan oleh seorang pengurus APKSINDO Jambi sebagai berikut:

“...petani sawit belum banyak mengetahui bahwa selain TBS masih banyak hasil lain dari proses pengolahan TBS maupun limbahnya. Sementara PKS yang menerima penjualan TBS dari petani, karena belum mampu mengolah limbah dari TBS kemudian menjual saja cangkangnya ke pelaku lain. Perusahaan bisa mengekspor cangkang tersebut seharga Rp 400,- sampai Rp 600,- per kg. Sementara SK Permentan no 14 tahun 2013 tentang penetapan harga TBS belum termasuk (menambahkan) harga cangkang dan limbah. Jadi petani kelapa sawit sama sekali belum ikut menikmati hasil sampingan TBS tersebut...”

Meski demikian, secara pengetahuan dan pengalaman lokal setempat, beberapa petani kelapa sawit di desa Bukit Baling sudah mengetahui bahwa ada hasil sampingan dari TBS. Seperti dikemukakan seorang petani di desa Bukit Baling sebagai berikut:

“...kami sebenarnya mengetahui bahwa limbah TBS (“janjangan tangkos”) juga masih dapat menghasilkan uang. Dari informasi yang disampaikan pedagang, limbah tandan tersebut bisa dijadikan pupuk seharga Rp 200.000,- per mobil truk kecil, dan kalau sudah menjadi abu pupuk bisa dijual seharga Rp 5000,- per kg. Selain itu, ada pula limbah (ampas) solid (“blondo”) yang juga dijadikan pupuk, bila dijual seharga Rp 50.000,- per karung (satu karung seberat 50 kg). Hasil cangkang juga bisa dijual untuk bahan bakar pabrik tahu. Limbah termahal adalah yang berupa limbah cair, biasanya disimpan PKS di kolam-kolam dan diangkut mobil keluar PKS. Katanya untuk digunakan sebagai bahan oli, bahkan bahan sabun. Kami tidak pernah ikut menikmati hasil sampingan TBS tersebut karena saat menjual TBS maka harga yang diterima itulah hasil pendapatan kami...”

Apabila benar bahwa suatu saat hasil sampingan proses pengolahan TBS bisa menghasilkan methane capture yang merupakan bahan bakar alternatif pembangkit tenaga listrik, maka tentu hal ini bisa menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi warga desa Bukit Baling maupun Mekarsari.

Kondisi saat ini di desa Bukit Baling ternyata belum semua rumah warga memperoleh aliran listrik dari negara. Selama ini mereka mengakses listrik dari swadaya masyarakat sendiri. Sebelum tahun 2010, sebagian warga masih menggunakan lampu tolok (minyak bumi) dan sebagian lagi warga telah mengakses listrik dengan menggunakan Generator Listrik. Selanjutnya selama 2 (dua) tahun ini warga melakukan swadaya mandiri mengadakan listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Seperti yang dikemukakan tokoh warga:

“...sejak 2 tahun yang lalu kami di desa ini mulai menggunakan PLTD, yang sebelumnya menggunakan Generator Listrik. Awalnya dulu ada warga yang inisiatif untuk mencoba menawarkan listrik dari PLTD dengan cara swadaya, dimana setiap KK yang ada dalam RT mengumpulkan uang Rp. 2 Jt yang digunakan untuk membeli kabel, mesin pembangkit dan meteran. Kemudian terlaksana juga harapan warga untuk memperoleh listrik dari PLTD...”



Gambar 6. PLTD di desa Bukit Baling

Kendala ini sejak dulu sudah warga rasakan betapa minimnya sarana listrik di desa Bukit Baling. Data Podes 2011 mencatat 68% KK tidak menggunakan listrik PLN (Lampiran 1). Di sana terdapat jaringan listrik negara yang sudah terpasang, namun belum ada aliran listriknya dan itu hanya sampai di muka desa saja. Program tersebut terhambat karena daya listrik yang dimiliki oleh Jambi tidak mampu teraliri sampai di sana. Di sisi lain, PLTD hasil swadaya warga telah menjadi harapan baru bagi mereka dibanding menggunakan sarana Generator Listrik yang pada dasarnya membutuhkan biaya yang sangat besar (Gambar 6). Sedangkan biaya listrik dari PLTD setiap bulannya relatif lebih rendah namun pelayanannya dirasakan warga cukup memuaskan. Seperti dikemukakan tokoh warga di bawah ini:

“...biaya bulanan ada Beban Listrik sebesar Rp. 150.000/bulan serta biaya daya sebesar Rp. 3.000/Kwh dengan masa menyala ada selama 12 jama (Pk. 18.00 – 06.00 Wib). Biaya yang dibayarkan setiap bulan oleh warga sebesar Rp. 220.000 – Rp. 300.000/bulan yang digunakan untuk daya TV, Lampu, Lemari Es, dan sebagainya. Setiap malam PLTD menghabiskan sekitar 100 Liter solar yang mengalir listrik kepada 93 KK dalam RT 15, dimama setiap RT di desa ini memiliki PLTD...”

Pengelolaan PLTD ini diurus oleh warga yang memang sudah siap menjadi pengurus. Semua pengelolaan dari input, proses dan outputnya dikerjakan oleh pengurus. Input di mulai dari penyediaan bahan bakar solar, penagihan iuran warga dan penyediaan peralatan listrik bagi warga. Kemudian pada tahap proses, pengurus mulai menyediakan pelayanan yaitu mulai menyalakan dan mematikan listrik sesuai jadwal dan bersedia tidak tidur semalaman hanya untuk memberikan pelayanan kepada warga. Sedangkan pada tahap output pengurus bertanggung jawab untuk merawat secara teknis PLTD dan juga bersedia menghadapi kendala-kendala yang dihadapinya. Sebagaimana dikemukakan tokoh warga:

“...pembayaran dilakukan setiap bulan kepada pengelola, yaitu 3 orang operator yang bertanggung jawab teknis PLTD, menyalakan, merawat dan mematikan mesin. Kendalanya saat ini warga juga ada yang menunggak pembayaran, namun tidak menghambat aliran listrik terus menyala karena warga yang menunggak secepatnya membayar daripada diputus alirannya secara sepihak oleh operator...”

Apabila kedepan PKS bekerjasama dengan perusahaan methan capture dan PLN dapat mewujudkan pembangunan listrik di Jambi menggunakan energi alternatif methan capture maka upaya mengelola listrik secara mandiri oleh komunitas di desa Bukit Baling ini dapat menjadi potensi kelembagaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan listrik berbasis komunitas. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai mana pengadaan energi listrik ini membuka akses yang adil bagi golongan terpinggirkan (miskin), mengingat biaya pembayaran iuran awal (modal membuat PLTD) dan biaya bulanan (untuk listrik PLTD) relatif cukup mahal bagi golongan miskin. Sampai mana pula golongan perempuan dilibatkan dalam kelembagaan pengelola PLTD, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan listrik untuk pembangkitan ekonomi alternatif pada siang hari, bila kapasitas listrik bisa ditingkatkan di siang hari.

Dari sisi produksi kelapa sawit, upaya pengembangan industri hilir kelapa sawit (IHKS) juga akan mendorong peningkatan kebutuhan akan produksi TBS. Hal ini tentu berimplikasi pada upaya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil produksi kebun kelapa sawit petani. Pasar produksi kelapa sawit yang makin meningkat menuntut petani kelapa sawit untuk dapat menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil produksi secara konsisten. Pada tahap ini, tentu dibutuhkan peningkatan pengetahuan bagi petani kelapa sawit yang mengelola sendiri kebunnya, maupun bagi petani kelapa sawit yang bermitra dengan PKS. Peningkatan kebutuhan produksi kelapa sawit akan mendorong PKS untuk membutuhkan pekerja yang semakin banyak. Dalam kerangka pengembangan

masyarakat desa, akan lebih baik lagi kalau bukan pekerja (buruh) perkebunan kelapa sawit yang dicari, namun membuka peluang kembali pola kemitraan perkebunan inti-rakyat, dimana petani berpartisipasi aktif dalam mengelola kebun kelapa sawitnya sendiri dengan pendampingan modal maupun peningkatan ketrampilan dari PKS.

Pola pendampingan peningkatan kapasitas pengetahuan petani kelapa sawit dalam budidaya, serta penguatan kelembagaan kelompok tani dan koperasi ini dapat didanai dari harga premium yang diberikan oleh PKS bila petani kelapa sawit mampu mematuhi dan menerapkan program-program pendampingan tersebut. Harga premium tersebut dapat dialokasikan dari keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit (PIHKS). Dalam penerapannya, pola pendampingan tersebut penting memberikan akses yang adil bagi kelompok termarjinalkan yaitu petani kecil (miskin) dan perempuan. Sebagai contoh, perempuan berkontribusi nyata dalam kegiatan pembibitan, pembuatan piringan dan pembersihan rumput, serta memungut buah-buah sawit yang tercecer jatuh. Namun seringkali perempuan terpinggirkan dalam program pembangunan, seperti kegiatan pelatihan, penyuluhan dan keanggotaan kelompok tani. Oleh karena itu pola pendampingan perlu menerapkan strategi yang responsif gender dalam pelaksanaannya.

Dampak pengembangan Methane Capture untuk energy listrik pada keluarga

Program pembangunan yang dianalisis adalah perkebunan kelapa sawit, dimana rencana proyek methane capture kedepan tentu akan mempengaruhi peningkatan produksi kelapa sawit, baik kuantitas (produktivitas), kualitas maupun kontinuitas produksinya. Hasil analisis pada Tabel 7. menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit secara sosial-budaya memberi dampak perubahan perilaku dari pekebun secara tradisi (untuk tanaman jelutong, duku, durian, pisang, karet) menjadi buruh

kebun kelapa sawit (mendisiplinkan diri dalam rutinitas kerja harian mengikuti tahapan kegiatan usaha budidaya kelapa sawit). Penanaman disiplin ini menjadi modal awal bagi pengembangan komunitas petani sawit untuk mulai mengelola usaha kebunnya sendiri dengan pendampingan dari PKS sebagai mitra dalam pola perkebunan inti-rakyat.

Penutup

Pengembangan *methane capture* sebagai salah satu pengembangan industri hasil kelapa sawit (PIHKS) melalui proses pengolahan kelapa sawit dari limbah cair menjadi bio energi dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain tentunya ramah lingkungan. Untuk desa Mekarsari dan Bukit Baling, insentif bagi pengembangan ekonomi petani kelapa sawit dapat berupa:

1. Di tingkat policy, perlu meninjau kembali pola kemitraan plasma yang berlangsung saat ini antara perusahaan dan petani kelapa sawit, dan membandingkannya dengan pola PIR (perkebunan inti rakyat) yang pernah diterapkan sebelumnya.
2. Di tingkat policy, perlu meninjau kembali SK Permentan no 14 tahun 2013 tentang penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS), karena perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi dari cangkang (limbah padat) dan limbah cair.
3. Di tingkat pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten), perlu adanya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan kelapa sawit yang pro pada kesejahteraan petani kelapa sawit melalui pengakuan hak atas lahan yang dikelola.
4. Di tingkat komunitas, pengembangan ekonomi kelapa sawit dilaksanakan berdasarkan pengembangan kapasitas petani kelapa sawit, dari semula

hanya menjadi penerima uang bagi hasil menjadi petani pengelola kebun kelapa sawit melalui strategi kemitraan inti-rakyat. Untuk itu perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani kelapa sawit melalui pendampingan.

5. Di tingkat komunitas, memberikan harga premium untuk hasil produksi petani kelapa sawit yang menerapkan program pendampingan. Harga premium tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan ketrampilan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan koperasi yang responsif gender.
6. Di tingkat kelembagaan kelompok tani dan koperasi, memastikan pengelolaan dan aturan yang memberikan akses yang adil bagi semua lapisan dan gender, sehingga mampu membuka partisipasi golongan tertinggal baik dalam pemanfaatan energi listrik maupun pengembangan ekonomi kelapa sawit untuk mendukung proyek methane capture.
7. Di tingkat komunitas dan keluarga, memberikan penyadaran gender dalam pengelolaan usaha kebun kelapa sawit dan pengelolaan ekonomi rumah tangga, agar tercipta hubungan kerja dan tanggungjawab yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari beban kerja ganda bagi kaum perempuan.
8. Memastikan terbentuknya kader perempuan dan kader petani kelapa sawit serta mandor kebun dari komunitas petani sawit yang akan didampingi dan ditingkatkan kapasitasnya agar mampu menjadi pendamping lokal dan membangun jaringan serta menguatkan kelembagaan kelompok tani dan koperasi apabila pendampingan dari PKS sudah selesai.

Daftar Pustkan

- Badan Pusat Statistik. (2012). *Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka*. Jakarta: CV. Nario Sari.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Data Potensi Desa*. Jakarta.
- Dimiyati & Mudjiono, 2002, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta
- United Nation Developmet Programme. (2003). *Human Development Report 2003 (Millennium Development Goals: A compact among nations to end human poverty)*. Oxford University Press.

Lampiran 1: Data Kependudukan Desa Bukit Baling dan Mekarsari 2011

No.	Keterangan	Desa	
		Mekarsari	Bukit Baling
1.	Jumlah Laki2 (Jiwa)	1.344	3.512
2.	Jumlah Perempuan (Jiwa)	1.237	3.271
3.	Jumlah Keluarga (KK)	682	1.926
4.	Jumlah Keluarga Pertanian (KK)	90%	70%
6.	Keluarga Pengguna Listrik PLN (KK)	76%	27%
7.	Keluarga Pengguna Listrik NON PLN (KK)	4%	68%

Sumber: Data Podes 2011 (BPS, 2012)